



TRIPS dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Di Indonesia

Sabri Fataruba

Pelaksanaan Kebijakan Penyanderaan Pajak (Gijzeling) Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Resmaya Agnesia Mutiara Sirait

Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau

Evi Deliana

Politik Hukum Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

Rahmiati

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi

Herman Katimin

Telaah Konsepsi Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Blue Constitution Di Indonesia

Fathan Ali Mubiina

Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Objek Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang MD3)

Paman Nurlette

Peluang dan Tantangan Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources di Indonesia

Popi Tuhulele

Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria Di Kabupaten Maluku Tenggara

Ronald Saija, Fransiscus Xaverius Roger Vincen Letsoin, Rory Jeff Akyuwen, Pieter Radjawane

Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon

Desy Kosita Hallauw, Jenny Kristiana Matuankotta, Novyta Uktolseja

Transparansi Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Legislatif

Reny Heronia Nendissa, Claudio Patrick I Rahakbauw

Koordinasi Kelembagaan dalam Penenggelaman Kapal Hasil Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Sherly Adam

Daftar Isi

(Volume 26 Nomor 1, Januari – Maret 2020)

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
TRIPS dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Di Indonesia <i>Sabri Fataruba</i>	1-8
Pelaksanaan Kebijakan Penyanderaan Pajak (<i>Gijzeling</i>) Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia <i>Resmaya Agnesia Mutiara Sirait</i>	9-19
Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau <i>Evi Deliana</i>	20-28
Politik Hukum Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah <i>Rahmiati</i>	29-38
Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi <i>Herman Katimin</i>	39-51
Telaah Konsepsi Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan <i>Blue Constitution</i> Di Indonesia <i>Fathan Ali Mubiina</i>	52-74
Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Objek Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang MD3) <i>Paman Nurlette</i>	75-88
Peluang dan Tantangan Penerapan Prinsip <i>Permanent Sovereignty Over Natural Resources</i> di Indonesia <i>Popi Tuhulele</i>	89-98
Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria Di Kabupaten Maluku Tenggara <i>Ronald Saija, Fransiscus Xaverius Roger Vincen Letsoin, Rory Jeff Akyuwen, Pieter Radjawane</i>	99-110
Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon <i>Desy Kosita Hallauw, Jenny Kristiana Matuankotta, Novyta Uktolseja</i>	111-118
Transparansi Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Legislatif <i>Reny Heronia Nendissa, Claudio Patrick I Rahakbauw</i>	119-127
Koordinasi Kelembagaan dalam Peneggelaman Kapal Hasil Tindak Pidana Di Bidang Perikanan <i>Sherly Adam</i>	128-142

Template dan Sistematika Penulisan Jurnal SASI